

PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, TRANSPARANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI SIDOARJO

Nila Aulia Nislandi¹, Munari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur
Munari.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Transparansi dibutuhkan untuk mengelola dana desa. Pemerintah desa wajib mempublikasikan laporan keuangan desa untuk kepentingan akuntabilitas dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membahas pengaruh kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Objek penelitian ini adalah seluruh desa di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS 3. Teknik sampling pada penelitian ini yaitu non probability sampling dengan teknik pengambilan sampel quota sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini berkontribusi dengan memberikan informasi tentang faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola dana desa, sehingga pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat umum.

Kata Kunci: Kompetensi, Transparansi, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Dana Desa.

Abstract

Transparency is required to manage village funds. Village governments are required to publish village financial reports for the purpose of village fund accountability. This study examines and discusses the influence of village government competence, transparency, and internal control systems on village fund management accountability. The object of this research is all villages in Buduran District, Sidoarjo Regency. The research method used is quantitative. The data used are primary data by distributing questionnaires. The analysis technique uses Partial Least Square (PLS) with the help of SmartPLS 3 software. The sampling technique in this study is non-probability sampling with a quota sampling technique. The results of this study indicate that village government competence influences village fund management accountability, transparency influences village fund management accountability, and the internal control system influences village fund management accountability. The results of this study contribute by providing information about what factors can influence the success of the village government in managing village funds so that the village government can be accountable for managing village funds to the general public.

Keywords: Competence, Transparency, Internal Control System, Accountability, Village Funds

PENDAHULUAN

Dalam organisasi sektor publik, akuntabilitas dapat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola keuangan dapat meningkat (Sofyani & Tahar, 2021). Strata pemerintahan yang paling bawah adalah pemerintah desa yang berinteraksi dengan masyarakat. Maka, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa sangat penting (Alpionita, 2021). Masyarakat harus terlibat dalam seluruh kegiatan yang memakai anggaran dana desa. Akuntabilitas menjadi kontrol atas seluruh kegiatan pemerintah desa hingga pertanggungjawaban pemakaian anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas dalam mengelola dana desa menyangkut kecakapan pemerintah untuk

bertanggungjawab atas program kegiatan yang dapat membangun desa (Wahyuni dkk, 2018). Setiap desa diberi dana yang besar guna menunjang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyebab pemerintah desa kurang memahami pengelolaan keuangan dengan baik dan benar karena terbatasnya latar belakang dalam Pendidikan akuntansi (Mualifu & Guspul, 2019). Kompetensi pemerintah desa yang andal dan dapat dipercaya bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, karena masih banyak pemerintah yang tidak kompeten dan tidak bertanggungjawab sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dan tidak selaras dengan standar yang telah ditetapkan.

Transparansi dibutuhkan untuk mengelola

dana desa. Pemerintah desa wajib mempublikasikan laporan keuangan desa untuk kepentingan akuntabilitas dana desa. Transparansi merupakan kebebasan masyarakat dalam mengetahui aktivitas pengelolaan dana desa. Memberikan informasi penggunaan dana desa secara terbuka diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu, untuk menunjang akuntabilitas dana desa perlu sistem pengendalian internal yang andal. Sistem pengendalian dibuat agar seluruh elemen di dalam pemerintahan mempunyai acuan dan aturan yang sistematis. Setiap organisasi harus mempunyai pengendalian agar hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa (Mualifu, dkk., 2019). Sistem pengendalian menjadi pedoman agar prosedur berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan.

Teori keagenen atau *Agency Theory* di sektor publik berpendapat bahwa pemerintah desa (agent) bertindak secara sadar bagi keuntungannya sendiri dan masyarakat (*principal*) berpendapat bahwa pemerintah tidak bisa dipercaya dalam bekerja dengan tepat untuk kepentingan publik. *Agency Theory* berpendapat bahwa ada informasi asimetri antara pemerintah yang mempunyai akses informasi dengan pihak masyarakat. Adanya informasi asimetri ini dapat menimbulkan masalah akuntabilitas dalam mengelola keuangan (Maria et al., 2021). Hal ini berkaitan, karena sebagai pihak *agent*, pemerintah bertanggungjawab membuat laporan pengelolaan keuangan desa yang dibutuhkan pihak *principal* (masyarakat). Pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan pengelolaan dana desa dan dapat memberikan transparansi informasi laporan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat mengurangi informasi asimetri sehingga kemungkinan terjadinya permasalahan dalam mengelola dana desa akan lebih kecil.

Secara nasional, pemerintah telah menganggarkan dana desa dengan jumlah yang sangat besar untuk mendukung program dan kebijakan desa dalam rangka pemberdayaan desa. Menurut BPKP (2022) di bawah ini adalah anggaran dana desa dari pemerintah pusat tahun 2018 – 2021 serta menurut Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo berikut ini adalah anggaran dana desa yang diterima setiap desa di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Tahun 2018 – 2021

Tahun	Rata-Rata Anggaran Dana Desa Secara Nasional	Rata-Rata Anggaran Dana Desa yang Diterima Desa Di Kecamatan Buduran
2018	Rp800,4 juta	Rp723 juta
2019	Rp933,9 juta	Rp828 juta

2020	Rp960,6 juta	Rp870 juta
2021	Rp1,6 miliar	Rp937 juta

Sumber : Data BPKP 2022

Pemerintah desa lebih banyak melakukan penyimpangan karena anggaran dana desa setiap tahunnya terus bertambah. Di Kabupaten Sidoarjo, terdapat beberapa kasus korupsi yang tidak menunjukkan pengelolaan pendapatan desa yang baik. Namun berbeda dengan desa di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Tidak ada kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam lima tahun terakhir, dan Kabupaten Buduran memiliki realisasi dana desa yang baik. Ini menjadi contoh yang baik karena mencerminkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Penulis tertarik untuk menguji faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa supaya dapat dijadikan contoh baik dan menjadi evaluasi bagi pemerintah desa lain.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah banyak diuji oleh penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Mualifu & Guspul (2019), Ramadhan & Indra (2021), dan Atiningsih et al., (2019) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Namun, berbeda dengan pernyataan Widyatama & Novita (2017), Indraswari & Rahayu (2021) dan Sweetania, et al. (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang tidak sesuai antara beberapa temuan dari penelitian terdahulu, maka peneliti bertujuan membuktikan temuan terbaru tentang pengaruh kompetensi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peneliti melakukan pembaruan penelitian, dengan penelitian dilakukan di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang belum pernah diteliti sebelumnya untuk menghasilkan riset terbaru, Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan membuktikan pengaruh kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berdasarkan teori keagenan, Jensen & Meckling (1976), konflik keagenan dapat terjadi karena perbedaan tujuan dan kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Teori keagenen atau *Agency Theory* di sektor publik berpendapat bahwa pemerintah desa (agent)

bertindak secara sadar bagi keuntungannya sendiri dan masyarakat (*principal*) berpendapat bahwa pemerintah tidak bisa dipercaya dalam bekerja dengan tepat untuk kepentingan publik. *Agency Theory* berpendapat bahwa ada informasi asimetri antara pemerintah yang memiliki akses informasi dengan pihak masyarakat. Adanya informasi asimetri ini dapat menimbulkan masalah akuntabilitas dalam mengelola keuangan (Maria & Halim, 2021). Hal ini berkaitan, karena sebagai pihak *agent*, pemerintah bertanggungjawab membuat laporan pengelolaan keuangan desa yang dibutuhkan pihak *principal* (masyarakat).

Kompetensi Pemerintah Desa

Kompetensi adalah kepribadian dan kecakapan individu yang terampil, dan pengetahuan yang menunjukkan kinerja seseorang. Kompetensi bisa diukur dan dievaluasi sehingga kualitas kinerja seseorang dapat meningkat (Diatmika & Rahayu, 2020). Kompetensi yang dimiliki seseorang harus memiliki penerahuan, karakteristik, dan keterampilan untuk menunjang kinerja dalam menyajikan laporan keuangan yang baik (Aprisyah & Yuliati, 2021). Sumber Daya Manusia adalah faktor yang sangat penting dalam instansi pemerintahan karena diyakini dapat membawa perubahan yang mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan (Fadila & Budiwitjaksono, 2022). Kompetensi merupakan kemampuan pegawai dalam menghadapi pekerjaannya. Kompetensi yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari kreativitas, inovasi, dan kemampuan dalam keberhasilan mengatasi masalah pekerjaannya.

Transparansi

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 menyatakan transparansi berarti keterbukaan dan kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan. Transparansi berarti masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengetahui proses anggaran yang berkaitan atas kesejahteraan masyarakat (Putra & Rasmini, 2019). Penyampaian informasi keuangan yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pelaporan keuangan yang jelas, relevan, dan mudah dipahami adalah bentuk transparansi (Pahlevi dkk., 2022). Bentuk transparansi adalah pertanggungjawaban atas kinerja keuangan oleh pemerintah desa dengan mengelola keuangan publik (Sarwono & Munari, 2022). Transparansi adalah hak dan kesempatan bagi masyarakat dalam mengetahui seluruh proses dan pelaksanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan.

Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyebutkan sistem pengendalian internal

merupakan proses berkelanjutan pada kegiatan yang dilakukan seluruh pegawai agar tercapai tujuan dengan kegiatan yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan asset negara, dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang berkelanjutan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh seluruh pegawai dan pimpinan untuk meyakinkan agar tercapai tujuan organisasi (Martini dkk., 2019). Sistem pengendalian internal adalah proses yang sudah dirancang untuk dijalankan dan menjadi kontrol oleh seluruh pegawai dengan tujuan agar seluruh proses pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menciptakan hasil yang efisiensi dan efektivitas.

Akuntabilitas

Farida, dkk. (2018) Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik mengenai semua kegiatan yang berkaitan dengan urusan publik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pengawas keuangan dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Masyarakat memiliki hak dalam mengetahui pengelolaan keuangan sehingga masyarakat bisa menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah dalam mengelola keuangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Martini, dkk. (2019) menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas integritas keuangan, ketaatan pengungkapan laporan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan dengan menyajikan dan melaaporkan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan melalui laporan keuangan kepada masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 proses pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa berdasar kepada asas-asas akuntabilitas dan dielola dengan disiplin dan tertib anggaran karena kepala desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan, namun perangkat desa melaksanakan teknis pengelolaan keuangan (Farida dkk., 2018). Pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa dalam pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Alokasi Dana Desa

Lalira, dkk. (2018) pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan sumber dana untuk desa dari dana perimbangan pusat dan daerah yang telah masuk ke dana Kabupaten/Kota untuk desa dengan perhitungan dana desa sekurang-

kurangnya 10% dari dana transfer pusat ke daerah dan dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi dana desa bersumber dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa (Herlambang & Haryati, 2022).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengindikasikan akuntabilitas alokasi dana desa dari hal-hal berikut: seluruh program yang memakai dana desa harus melewati proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang terbuka dengan prinsip untuk masyarakat. Seluruh kegiatan yang memakai dana desa secara administrasi, hukum, dan teknis harus dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana desa memegang prinsip terkendali, terarah, dan hemat. Dalam APBDesa, alokasi dana desa harus dicatat melalui proses penganggaran sesuai dengan mekanisme yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

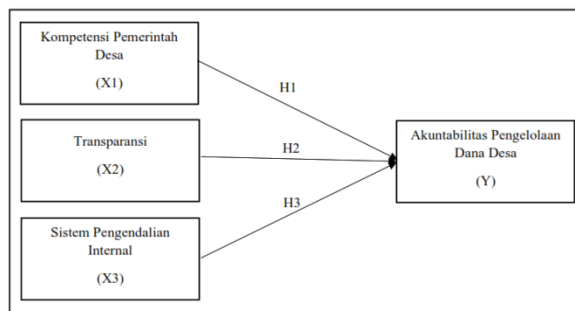
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk membuktikan uji hipotesis penelitian yang menganalisis pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y), di mana dalam penelitian ini variabel (X1) Kompetensi Pemerintah Desa, (X2) Transparansi, dan (X3) Sistem Pengendalian Internal sedangkan variabel (Y) adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Lokasi penelitian ini adalah 15 Desa yang ada di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Objek penelitian ini adalah kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa yang ada di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini terdiri dari pemerintah desa di 15 desa yang ada di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Teknik *sampling* menggunakan *non probability sampling*. Teknik sampel menggunakan *quota sampling*. Dalam penelitian ini, menggunakan jumlah sampel sebanyak 45 sampel dengan jumlah yang ditentukan peneliti. Di mana sampel diambil dari pemerintah desa yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa di setiap desa yang ada di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari pertanyaan melalui kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada pemerintah desa yang memenuhi kriteria dalam pengelolaan dana desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa di seluruh desa Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengumpulkan, memodelkan, dan mengubah data dengan maksud pemilahan dan mendapatkan informasi yang bermanfaat, memberikan saran, serta memberi kesimpulan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis Teknik analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *software* SmartPLS 3. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap di antaranya *outer model*, *inner model*, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Convergent Validity

Tabel 2. Hasil Uji *Convergent Validity*

Variabel	Indikator	Outer Loading	Valid
Kompetensi Pemerintah Desa (X1)	X1_1	0.732	Valid
	X1_2	0.790	Valid
	X1_3	0.733	Valid
	X1_4	0.753	Valid
	X1_5	0.710	Valid
Transparansi (X2)	X2_1	0.866	Valid
	X2_2	0.833	Valid
	X2_3	0.908	Valid
	X2_4	0.936	Valid
	X2_5	0.936	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X3)	X3_1	0.939	Valid
	X3_2	0.845	Valid
	X3_3	0.909	Valid
	X3_4	0.952	Valid
	X3_5	0.958	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y_1	0.902	Valid
	Y_2	0.762	Valid
	Y_3	0.861	Valid
	Y_4	0.823	Valid
	Y_5	0.864	Valid

Berdasarkan hasil *outer loading* seluruh indikator pada variabel dikatakan valid karena memenuhi nilai *convergent validity* di mana tidak ada indikator yang memiliki nilai < 0,7.

Discriminant Validity

Tabel 3. Output AVE

Indikator	AVE	\sqrt{AVE}
Kompetensi Pemerintah Desa (X1)	0.554	0.744
Transparansi (X2)	0.804	0.897
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0.849	0.921
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.712	0.844

Berdasarkan hasil perbandingan tabel di atas, diketahui nilai akar AVE (\sqrt{AVE}) di setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan AVE, hal ini dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam model memenuhi kriteria nilai *discriminant validity*.

Composite Reliability

Suatu konstruk dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *composite reliability* > 0,7 dan Cronbach's Alpha > 0,7. Berikut ini merupakan *output composite reliability* dan *Cronbach's Alpha*:

Tabel 4. Composite Reliability

Indikator	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
X1	0.808	0.861	0.554
X2	0.938	0.953	0.804
X3	0.955	0.966	0.849
Y	0.898	0.925	0.712

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas semua variabel di atas dapat dikatakan memiliki reliabel yang baik dari *Composite Reliability* karena nilainya di atas 0,7 dan secara *Cronbach's Alpha* nilainya di atas 0,7. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk dalam model yang diestimasi memiliki reliabilitas yang baik.

Model Struktural (Inner Model)

Uji Coefficient of Determination (R²)

Tabel 5. Uji R-Square

Indikator	R-Square	R-Square Adjusted
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.691	0.668

Berdasarkan tabel uji di atas, menunjukkan bahwa nilai R-Square untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,691. Hal ini berarti variabel bebas dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal sebesar 69,1%, sedangkan sisanya sebesar 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

Uji Predictive Relevance (Q²)

Tabel 6. Uji Predictive Relevance

Konstruk	Q-Square (Q ²)
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.451

Berdasarkan pengujian Q² di atas menunjukkan nilai *predictive relevance* sebesar 0.451. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut dikatakan layak, karena nilai Q-Square > 0 yaitu sebesar 0.451.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan bantuan *software* SmartPLS 3. Pengujian secara statistik pada setiap hubungan yang dihipotesiskan menggunakan PLS dilakukan dengan cara simulasi, yaitu dengan melakukan *bootstrapping* pada sampel. Berikut hasil uji hipotesis pada setiap variabel:

Tabel 7. Uji Hipotesis

Indikator	Original Sample (O)	T Statistik	P Value	Keterangan
X1 -> Y	0.287	2.236 > 1.96	0.026 < 0.05	Berpengaruh
X2 -> Y	0.427	2.356 > 1.96	0.019 < 0.05	Berpengaruh
X3 -> Y	0.439	3.223 > 1.96	0.001 < 0.05	Berpengaruh

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menyatakan bahwa Kompetensi Pemerintah Desa (X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil uji ini sejalan dengan penelitian oleh Ramadhan & Arza (2021) dan Aprilia & Fitria (2020) yang menemukan bahwa kompetensi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pada teori keagenan, hubungan keagenan muncul Ketika masyarakat (*principal*) mempercayai pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa (*agent*). Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat menyebabkan informasi asimetri karena *agent* bertanggungjawab atas informasi pengelolaan dana desa, sehingga *principal* mendorong *agent* untuk bertindak secara terbuka dan akuntabel dalam melaksanakan kewenangannya. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan dana desa, di mana pemerintah desa (*agent*) harus berkompeten dalam menjalankan tanggung jawab atas menyajikan laporan keuangan terkait pengelolaan dana desa yang dibutuhkan oleh

pihak masyarakat (*principal*). Kompetensi pemerintah desa yang baik dan terampil dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menyatakan bahwa Transparansi (X2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil uji ini sejalan dengan pendapat Renggo (2018) dan Mualifu, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pada teori keagenan, pemerintah desa (*agent*) akan bertindak dan berbuat untuk kepentingan diri sendiri. Pemerintah desa dianggap tidak bisa dipercaya untuk kepentingan masyarakat (*principal*). Adanya informasi pengelolaan dana desa yang transparan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana desa dikelola dengan baik sehingga akan mengurangi permasalahan informasi asimetri antara pihak pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya transparansi, pemerintah desa dapat dicurigai oleh masyarakat melakukan kecurangan sehingga menyebabkan informasi asimetri. Semakin berkurang informasi asimetri maka kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan dana desa semakin kecil.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dari hasil analisis *inner model* dapat diketahui bahwa Sistem Pengendalian Internal (X3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil pengujian ini sependapat dengan penelitian Ramadhan & Arza (2021) dan Sweetania, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pada teori keagenan, pemerintah desa (*agent*) akan berbuat untuk kepentingan diri sendiri dan dipandang tidak bisa dipercaya terhadap kepentingan masyarakat (*principal*). Penyimpangan atau kecurangan masih sering terjadi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, oleh karena itu pemerintah desa membutuhkan sistem pengendalian internal untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kecurangan. Pemerintah desa diharapkan mempertanggungjawabkan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kepala desa diharapkan dapat mengontrol pegawai agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat mengurangi informasi asimetri antara pihak

masyarakat dan pemerintah desa yang dapat mengakibatkan permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian secara kuantitatif yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini telah menguji kebenaran sebagai berikut ini :

1. Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Artinya, semakin baik kompetensi yang dimiliki pemerintah desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik.
2. Transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik.
3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Artinya, semakin baik sistem pengendalian internal yang dirancang maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik.

Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Menambahkan variabel yang belum pernah diteliti sebelumnya sehingga menghasilkan temuan baru.
2. Memperluas populasi dan sampel sehingga ruang lingkup penelitian lebih luas dan mendapatkan hasil lebih spesifik.
3. Peneliti diharapkan untuk mendampingi responden saat mengisi kuesioner sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat.
4. Peneliti dapat memperluas objek penelitian dan memperluas sampel penelitian, sehingga sampel yang didapatkan lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpionita, R. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang). *Juhanperak*, 2(1).
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*,

- 5(2), 1855–1869.
- Atiningsih, S., Aulia, Ningtyas, C., Bank, S., & Jateng, B. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1).
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2020). Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng. *IJSSH: Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(4), 215–223.
- Fadila, S. N., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(2), 472–484.
- Farida, V., Jati, W. A., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73.
- Herlambang, M., & Haryati, T. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 129–138.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial, Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 62–72.
- Maria, E., Kristen, U., Wacana, S., & Halim, A. (2021). E-Government Dan Korupsi: Studi Di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan. *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 5(1).
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123.
- Mualifu, A., & Guspul, H. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1).
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1480–1486.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kapuas Dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1).
- Ramadhan, W., & Indra Arza, F. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(4).
- Renggo, B. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA).
- Sarwono, N. R. U., & Munari, M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Good Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(2), 616–622. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.500>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1).
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F.,

- & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44-56.
- Wahyuni, S., Indrawati, N., & Al Azhar, A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 98-110.
- Widyatama, A., & Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2).